



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (L K I P) 2022

**DINAS TENAGA KERJA
KOTA CIMAHI**

**# bangga
melayani
bangsa**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**VISI
CIMAHI
KOTA CERDAS**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
1.4 Gambaran Umum Organisasi	10
1.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	16
2.4 Strategi dan Kebijakan SKPD	18
2.5 Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	31
3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	
Sasaran Strategis	32
3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi	
Pencari Kerja.....	32
3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Penempatan	
Tenaga Kerja	36
3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan	
Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	38
3.3 Realisasi Anggaran	40
3.4 Inovasi	46
BAB IV PENUTUP	49

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta member petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022, disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 ini diharapkan semaksimal mungkin dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta melalui laporan ini dapat memberikan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi selain itu juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai wujud peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi, misi, tujuan Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang ketenagakerjaan.

Semoga LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022 ini dapat bermanfaat, walaupun kami menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan pada penyusunan Laporan Kinerja ini. Dengan kerendahan hati, saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna hasil lebih baik di masa mendatang.

Cimahi, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA CIMAHI**


Ky Drs. YANUAR TAUFIK, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640121 199102 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2017-2022. Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

dengan indikator :

- Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi
 - Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi ditargetkan 10% dan tercapai sebesar 8,85 % dengan tingkat capaian indikator 88,50 %;
- Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
 - Indikator Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ditargetkan 5% tercapai 25,98 % dengan tingkat capaian indikator 519,94 %;

Total Peserta Pelatihan 565 Orang

- Melalui APBD sebanyak 230 Orang
 - Pelatihan Menjahit Busana Industri sebanyak 150 Orang
 - Pelatihan Barista Coffee sebanyak 40 Orang
 - Pelatihan Bahasa Jepangsebanyak 40 Orang
- Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebanyak 335 Orang
 - Pelatihan Bekam dan Refleksi Bagi Penyandang Tunanetra sebanyak 22 Orang
 - Pelatihan Menjahit Busana Industri sebanyak 285 Orang
 - Pelatihan IT Digital sebanyak 28 Orang

2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

dengan indikator :

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan;

Indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan ditargetkan 50 % dan tercapai 77,68 % dengan tingkat capaian indikator 155,36 %.

Untuk Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi telah berhasil menempatkan sebanyak 1947 orang.

1. BKK : 564 Orang
 2. LPK : 77 Orang
 3. Sidakep Tri : 678 Orang
 4. CPMI : 63 Orang
 5. Pelatihan : 565 Orang
3. Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial dengan indikator :

Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan.

Indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan ditargetkan 50% dan tercapai 100% dengan tingkat capaian indikator 200%.

Upaya pencapaian kondusifitas ketenagakerjaan, Disnaker juga berhasil meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Tenaga Kerja sebanyak 914 Perusahaan atau 58,18% dari total 1571 Perusahaan dengan Jumlah peserta BPJS bagi Tenaga Kerja sebanyak 62.471 orang atau 95.07%. Selain itu jumlah perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kota juga meningkat menjadi 224 perusahaan atau 14,26% yang artinya terjadi peningkatan sebesar 6,26% dengan jumlah Tenaga Kerja penerima UMK 33,682 orang, dengan penambahan sebanyak 10,876 orang. Begitu pula jumlah perusahaan yang mempekerjakan kaum Disabilitas kembali meningkat menjadi 143 orang dari semula 107 orang. Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah diselesaikan berjumlah 45 kasus, 24 Kasus diantaranya diselesaikan melalui Perjanjian Bersama, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 17 Kasus.

Realisasi anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.10.295.214.368,- dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.949.849.853,- (realisasi sebesar 94.02 %) sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 654.635.485,- atau 5.98%.

4. Sidakeptri Mobile

Selain itu Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi juga berhasil mengembangkan inovasi ketenagakerjaan dengan kebijakan “System Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi (SidakepTri)” mobile yaitu:

1. Menyajikan data ketenagakerjaan yang lengkap dan Up to date.
2. Memudahkan pemberi kerja dalam menginformasikan lowongan pekerjaan terbaru secara luas
3. Menyediakan informasi pelatihan baik dari dalam maupun luar Kota Cimahi
4. Menyediakan informasi lowongan pekerjaan baik dari dalam maupun luar Kota Cimahi
5. Memperluas kesempatan kerja
6. Mempercepat link and match antara pencari kerja dan pemberi kesempatan kerja (perusahaan)
7. Menurunkan angka pengangguran
8. Memfasilitasi pencari kerja dalam melakukan pengajuan kartu pencari kerja (AK1) secara online
9. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai peluang dan kesempatan kerja sesuai kualifikasi

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah yaitu di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja wewenang Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial serta Transmigrasi, pelaksanaan urusan Kesekretariatan terdiri atas Sekretaris dan 2 Sub Bagian. Adapun fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilakukan secara profesional oleh Sumber Daya Aparatur yang ada di dalamnya dan tergambar pada struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi :

1. Instruktur Ahli Muda Instruktur; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :
- Mediator Ahli Muda Hubungan Industrial.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya aparatur pada Dinas Tenaga Kerja saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Jabatan eselon II.b : 1 orang
 - b. Jabatan eselon III.a : 1 orang
 - c. Jabatan eselon III.b : 2 orang
 - d. Jabatan eselon IV.a : 3 orang
 - e. Jabatan Fungsional : 3 orang
 - f. Unsur Pelaksana : 14 orang
- Jumlah keseluruhan : 23 orang**

Gambaran Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dilihat dari aspek golongan, pendidikan dan masa kerja adalah sebagai berikut:

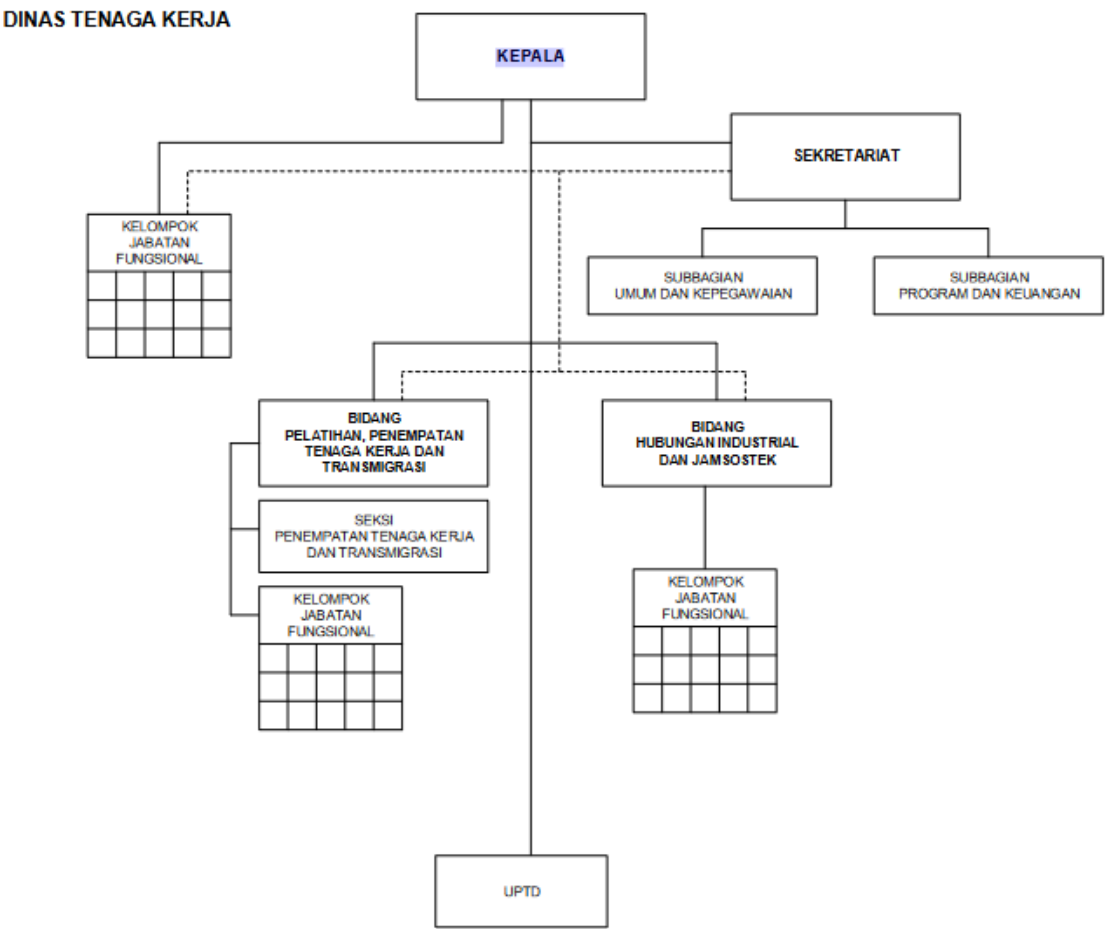
No	Jabatan/Bagian	Pangkat/ Golongan Ruang	Jenjang pendidikan/jurusan	Jumlah Personil
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	S2/Magister Managemen Sumber Daya Manusia	1
2.	Sekretaris	Pembina, IV/a	S2/Administrasi Publik	1
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	Penata, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Administrasi Negara	1
3.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembina, IV/a	S1/ Manajemen Pembangunan Daerah	1
	Kepala Seksi Penempatan dan Transmigrasi	Penata Tingkat I, III/d	S1/ Ilmu Hukum	1
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pembina, III/d	S.1/Ilmu Administrasi Negara	1



	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Mediator Hubungan Industrial.	Penata Tingkat I, S.1/Illmu Hukum III/d		1
	J u m l a h			8

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022 telah mengalami perubahan dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan organisasi. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, sebagaimana tergambarakan di bawah ini sebagai berikut :



1.5 PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen LKIP karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD :

- a. Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pengangguran yang relatif masih tinggi dan terbatasnya kesempatan kerja;
- b. Rendahnya pendidikan calon peserta pelatihan (pencari kerja) dan masih rendahnya kualitas, produktivitas, dan pendidikan tenaga kerja;
- c. Peminat Transmigrasi/Calon Transmigran reguler yang mendaftar sangat terbatas akibat kurangnya informasi dan pemahaman tentang transmigrasi;
- d. Kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan kesejahteraan kepada pekerja masih terbatas;
- e. Peran serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan masih belum optimal;
- f. Masih kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban serta prosedur penyelesaian masalah dari sebagian pekerja masih rendah;
- g. Belum optimalnya Hubungan Industrial antara pekerja dengan pengusaha yang dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
- h. Belum Optimalnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang didaftarkan melalui program Jamsostek;
- i. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan;

Adapun isu-isu strategi yang berpengaruh adalah sebagai berikut:

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sempat terjadi di tahun 2020 kemudian mengalami perbaikan di tahun 2021 dan 2022, seiring dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian Kota Cimahi yang

didukung pula oleh bergulirnya program-program pemulihan ekonomi di Pusat, Provinsi dan di Kota Cimahi. Hampir seluruh lapangan usaha di kota Cimahi mengalami peningkatan di tahun 2022 yang menunjukkan adanya perbaikan aktivitas produksi di sektor tersebut.

Seiring dengan peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja, dengan demikian akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran. Setelah pada mengalami sedikit penurunan TPT pada tahun 2021, TPT di Kota Cimahi kembali menurun secara signifikan pada tahun 2022. Meskipun masih menjadi salah satu kota dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Barat, namun menurut data BPS TPT Kota Cimahi Tahun 2022 tercatat menurun sebesar -2,3 poin menjadi 10,77%.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi mengacu kepada visi dan misi Walikota. Visi merupakan pandangan jauh ke depan mengenai tujuan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sementara Misi merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

Secara teknis, Visi, Misi dan Target yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja sebagai usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, harus tetap sesuai dengan Arah Pembangunan Pemerintah Kota, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Tujuan Pembangunan Nasional, sehingga dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara spesifik berada pada kebijakan dan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Prioritas Pembangunan Nasional.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi mengacu kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), Visi merupakan pandangan jauh ke depan mengenai tujuan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, sementara Misi merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

Secara teknis, Visi, Misi dan Target yang telah ditetapkan di Dinas Tenaga Kerja sebagai usaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, harus tetap sesuai dengan Arah Pembangunan Pemerintah Kota, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Tujuan Pembangunan Nasional, sehingga dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara spesifik berada pada kebijakan dan Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat serta Prioritas Pembangunan Nasional.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, tetap berada dalam kerangka

melanjutkan dan meningkatkan, memperkuat serta memantapkan pencapaian pembangunan. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah tersebut akan dicapai melalui yaitu misi yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah Terpilih yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dari hasil telaahan visi dan misi Walikota terpilih maka dari misi yang diajukan untuk melaksanakan visi tersebut yang sesuai dan sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi 2017-2022 adalah :

MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, maka disusun beberapa strategi sebagai tindakan yang harus dilaksanakan agar cita-cita tersebut dapat terwujud, yaitu :

- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan
- Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak
- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi
- Perluasan informasi kerja

- Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja
- Peningkatan kerjasama transmigrasi

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan cerminan dari kondisi yang diinginkan. Tujuan merupakan penjabaran Visi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dalam menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra SKPD ini berakhir.

Sedangkan sasaran adalah gambaran hal yang ingin diwujudkan guna mencapai tujuan telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah :

TUJUAN :

Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran :

I. Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

Program

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

II. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Program

1. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan

- 1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pelayanan antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
- 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair /Bursa Kerja
- 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- 4) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

III. Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial

Program

1. Program Hubungan Industrial

Kegiatan

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro

2.4 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Program indikatif yang dirumuskan adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan SKPD dalam melaksanakan misi. SKPD memiliki peranan aktif untuk melaksanakan program sebagai strategi menghadapi perubahan lingkungan. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang

diambil pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 2023-2026.

Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah:

- Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan

bahwa Dinas Tenaga Kerja, memiliki peran strategis untuk menciptakan sebuah iklim yang baik yang berkaitan dengan hubungan industrial sehingga harmonisasi di lingkungan perusahaan akan terasa nyaman dan dikemas dalam nuansa keterbukaan yaitu pihak pengusaha dan organisasi pekerja/serikat pekerja. Dampak positif yang akan terjadi adalah agar pekerja dapat bekerja dengan lebih semangat dan tenang karena tercipta sebuah keadilan untuk bersama yaitu adanya peningkatan taraf hidup pekerja dan disisi lain pengusaha pun tetap mendapatkan keuntungan.

- Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak

Bahwa demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang layak di Kota Cimahi, Dinas Tenaga Kerja memiliki fungsi menciptakan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang – undangan sehingga diharapkan setiap perusahaan di Kota Cimahi dapat melaksanakan sarana Hubungan Industrial pada setiap aspeknya, dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GSC) yaitu *Fairness*, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemadirian, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Aspek-aspek Tata Kelola Kerja yang Layak, yaitu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, struktur skala upah, lembaga kerjasama bipartit, dan perlindungan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

- Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi

Dinas Tenaga Kerja senantiasa melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pencari kerja agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh user. Selain itu, tujuan pelatihan yaitu agar

pencari kerja menjadi tenaga kerja yang berkualitas sehingga mampu bersaing di dunia industri atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

- Perluasan informasi kerja

pembangunan bidang ketenagakerjaan, informasi dan data yang akurat berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan dan evaluasi untuk program tenaga kerja dan transmigrasi, khususnya informasi pasar kerja. Aspek perencanaan dan informasi sangat diperlukan, untuk itu perlu dilakukan pendataan tenaga kerja dan transmigrasi baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, sehingga menyediakan informasi mengenai ketenagakerjaan dan transmigrasi secara makro, sectoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

- Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja

Peningkatan kerjasama penempatan tenaga kerja bertujuan sebagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi para pencari kerja yang termasuk dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan juga memberikan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja sehingga diharapkan upaya ini dapat menekan dan mengurangi jumlah pengangguran, membangun hubungan dan jejaring kerja agar ada perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Cimahi.

- Peningkatan kerjasama transmigrasi

Program transmigrasi adalah salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan wilayah dan pembangunan di suatu daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan yang relatif hidup dibawah garis kemiskinan (prasejahtera). Sehingga upaya-upaya tersebut sangat diperlukan setiap tahunnya dengan harapan program transmigrasi dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Peningkatan hubungan industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan	Menurunkan perselisihan dan pekerja angka pengusaha	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penerapan Tata Kelola Kerja yang layak	Peningkatan jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi	Memberikan pelatihan dan sertifikasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja	Membuka kesempatan pemagangan dan penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)
				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Perluasan informasi kerja	Menyediakan pusat informasi ketenagakerjaan		
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kesesuaian Program di RTKD dengan Program di Renstra
	Peningkatan kerjasama transmigrasi	Menempatkan calon transmigran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI
PERIODE 2021 - 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung - Jawab	Lokasi
						Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
						Target	Rp.	Target	Rp.			
1.	Menurunkan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian Program di RTKD dengan Program di Renstra		0	0	90 %	95.000.000	90 %	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK		0	0	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen RTKD Kota Cimahi		0	0	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		5%	2.346.909.100	5 %	2.346.909.100	5 %	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Persentase pencari kerja yang memiliki standar kompetensi		10 %		15 %		15 %	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	- Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan Sertifikasi - Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan; - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang mengikuti Bimbingan teknis;		- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	1.549.205.600	- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	1.549.205.600	- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	- Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan; - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang mengikuti Bimtek; - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang disertifikasi		- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	1.498.975.600	- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	1.498.975.600	- 60 Orang - 200 Orang - 80 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	- Jumlah Instruktur yang Bersertifikat		- 10 Orang	50.230.000	- 10 Orang	50.230.000	- 10 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di bina		31 LPK	47.450.200	31 LPK	47.450.200	31 LPK	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	- Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di bina		31 LPK	47.450.200	31 LPK	47.450.200	31 LPK	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		1 Dokumen	750.253.300	1 Dokumen	750.253.300	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi



			- Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		1 Dokumen	750.253.300	1 Dokumen	750.253.300	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan		40 %	987.701.300	50 %	987.701.300	50 %	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang disalurkan dan ditempatkan		1.000 Orang	224.984.900	1.000 Orang	224.984.900	1.000 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	- Jumlah Fungsional Pengantar Kerja		1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	2 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pelayanan Antar Kerja	- Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang disalurkan dan ditempatkan		1.000 Orang	224.984.900	1.000 Orang	224.984.900	1.000 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Pelayanan		1 Unit	150.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Perluasan Kesempatan Kerja	- Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Bimtek		150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	- Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Operasional - Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dikelola - Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja		- 12 Bulan - 1 Aplikasi - 5 Media	625.498.200	- 12 Bulan - 1 Aplikasi - 5 Media	625.498.200	- 12 Bulan - 1 Aplikasi - 5 Media	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	- Jumlah Bulan Pemeliharaan dan Operasional		12 Bulan	175.756.000	12 Bulan	175.756.000	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	- Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dikelola - Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja		- 1 Aplikasi - 5 Media	99.742.200	- 1 Aplikasi - 5 Media	99.742.200	- 1 Aplikasi - 5 Media	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Job Fair/Bursa Kerja	- Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Job Fair - Jumlah Pencari Kerja yang tersalurkan melalui Job Fair - Jumlah Perusahaan yang mengikuti Job Fair		- 5.000 Orang - 150 Orang - 30 Perusahaan	350.000.000	- 5.000 Orang - 150 Orang - 30 Perusahaan	350.000.000	- 5.000 Orang - 150 Orang - 30 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)						100.000.000		Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi		0	0	3 Kali	100.000.000	3 Kali	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan TKA yang mendapatkan Sosialisasi		- 35 Perusahaan	37.218.200	- 35 Perusahaan	37.218.200	- 35 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan TKA yang mendapatkan Sosialisasi		- 35 Perusahaan	37.218.200	- 35 Perusahaan	37.218.200	- 35 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi

	Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan		50 %	1.709.180.108	50 %	1.709.180.108	50 %	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama		- 44 Dokumen	558.513.200	- 44 Dokumen	558.513.200	- 44 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	- Jumlah Peraturan Perusahaan		- 40 Dokumen	98.193.800	- 40 Dokumen	98.193.800	- 40 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	- Jumlah Perjanjian Kerja Bersama		- 4 Dokumen	98.193.800	- 4 Dokumen	98.193.800	- 4 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	- Jumlah Perusahaan yang ikut serta dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Jumlah Tenaga Kerja yang ikut serta dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan		-289 Perusahaan -52.000 -8 Kali	362.125.600	-289 Perusahaan -52.000 -8 Kali	362.125.600	-289 Perusahaan -52.000 -8 Kali	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Kasus Perselisihan yang difasilitasi		- 25 Kasus	1.150.666.908	- 25 Kasus	1.150.666.908	- 25 Kasus	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Fasilitas Deteksi Dini (kondusifitas ketenagakerjaan) - Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial - Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimtek Struktur Skala Upah		- 4 Kegiatan - 1 Kali - 5 Perusahaan	476.175.300	- 4 Kegiatan - 1 Kali - 5 Perusahaan	476.175.300	- 4 Kegiatan - 1 Kali - 5 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Kasus Perselisihan yang difasilitasi		- 25 Kasus	122.033.500	- 25 Kasus	122.033.500	- 25 Kasus	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	- Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan		- 6 Dokumen	177.208.500	- 6 Dokumen	177.208.500	- 6 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Fasilitas LKS Tripartit - Jumlah Fasilitas Serikat Pekerja		- 8 Kali - 6 Kali	375.249.608	- 8 Kali - 6 Kali	375.249.608	- 8 Kali - 6 Kali	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi



			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun	0	0	0	100.000.000	0	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali	100.000.000	4 Kali	100.000.000	4 Kali	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum - Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	- BB - 100 % - 90%	5.615.024.573	- BB - 100 % - 90%	5.615.024.573	- BB - 100 % - 90%	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Kendaraan yang di asuransikan	12 Bulan	8.350.000	12 Bulan	8.350.000	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Kendaraan yang di asuransikan	12 Bulan	8.350.000	12 Bulan	8.350.000	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang dibina	40 Orang	75.772.500	40 Orang	75.772.500	40 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang dibina	40 Orang	75.772.500	40 Orang	75.772.500	40 Orang	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	4 Dokumen	4.448.876.075	4 Dokumen	4.448.876.075	4 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	1 Dokumen	5.628.400	1 Dokumen	5.628.400	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	13 Dokumen	52.619.100	13 Dokumen	52.619.100	13 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Fasilitas gaji dan tunjangan	12 Bulan	4.390.628.575	12 Bulan	4.390.628.575	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	12 Bulan	322.222.800	12 Bulan	322.222.800	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	27.350.000	12 Bulan	27.350.000	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan aturan	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	71.800.500	12 Bulan	71.800.500	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi

			SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	15.448.800	12 Bulan	15.448.800	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pengadaan ATK		12 Bulan	8.772.500	12 Bulan	8.772.500	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan	174.851.000	12 Bulan	174.851.000	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	246.701.198	12 Bulan	246.701.198	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor		12 Bulan	125.001.198	12 Bulan	125.001.198	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara		3 Unit	121.700.000	3 Unit	121.700.000	3 Unit	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(1) Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (2) Jumlah Set Pengadaan Mebeulair		(1) 1 Unit (2) 1 Set	140.095.000	(1) 1 Unit (2) 1 Set	140.095.000	(1) 1 Unit (2) 1 Set	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel	Jumlah Set Pengadaan Mebeulair		1 Set	20.000.000	1 Set	20.000.000	1 Set	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 Unit	120.095.000	1 Unit	120.095.000	1 Unit	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	249.019.800	12 Bulan	249.019.800	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi		12 Bulan	8.400.000	12 Bulan	8.400.000	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Bulan Jasa Listrik		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Bulan Jasa Air		0		0		0	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor		12 Bulan	48.938.700	12 Bulan	48.938.700	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Kantor		12 Bulan	191.681.100	12 Bulan	191.681.100	12 Bulan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi



			KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun		16 Dokumen	123.987.200	16 Dokumen	123.987.200	16 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP		1 Dokumen	81.828.800	1 Dokumen	81.828.800	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah dokumen monev kinerja bulanan		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah dokumen monev kinerja tahunan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah dokumen monev kinerja triwulan		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah SOP yang disusun		0 SOP		0 SOP		0 SOP	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah SOP yang sertifikasi ISO		0 SOP		0 SOP		0 SOP	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Nilai SKM Perangkat Daerah		82 Poin		82 Poin		82 Poin	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	3.394.900	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	6.462.000	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	6.043.700	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	3.404.000	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
			SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran		1 Dokumen	22.853.800	1 Dokumen	22.853.800	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Dokumen Renja		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Dokumen Renja Perubahan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi
				Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	Dinas Tenaga Kerja	Kota Cimahi



2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.			
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	10%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	5%
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	50%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	50%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.6.287.834.153
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 54.004.000
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.184.141.600
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 596.406.400
5	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.197.262.200
	Jumlah	Rp. 9.319.648.353



Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah.			
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	10%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	5%
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	50%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	50%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.330.471.575
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 100.006.678
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.687.298.100
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 607.011.300
5	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.211.257.200
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 13.805.000
	Jumlah	Rp. 10.949.849.853

Mencermati target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja pada Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2022 terdapat penambahan yang dituangkan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena penambahan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp. 1,503,156,500 yang di alokasikan untuk :

- Pelatihan Bekam dan Refleksi Bagi Penyandang Tunanetra sebanyak 22 Orang
- Pelatihan Menjahit Busana Industri sebanyak 285 Orang
- Pelatihan IT Digital sebanyak 28 Orang

Total sebanyak 335 Orang.



Selain itu juga dimunculkannya kembali Program Transmigrasi sebesar Rp. 13.805.000 yang dipergunakan untuk sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggung jawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh manarealisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALIASASI 2022	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	10%	7,96 %	79,60 %
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	5%	25,98%	519,54%
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	50%	77,68%	155,36%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	50%	100 %	200%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi belum mencapai target.

Hal ini dikarenakan Sertifikasi Kompetensi tidak dilaksanakan mengingat anggaran yang dibutuhkan relatif besar dan ketersediaan anggaran yang belum memadai. Sehingga Dinas Tenaga Kerja berinovasi dengan bekerja sama dengan APINDO untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang memduduki jabatan bidang manajemen SDM/*Human Resources Departement*.

Selain itu, capaian dari indikator Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan capaiannya jauh melebihi target, hal ini disebabkan karena adanya penambahan Anggaran DBHCHT yang dipergunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, sehingga pada tahun 2022 terdapat penambahan Pencari Kerja terdaftar yang dilatih sebanyak 335 Orang.

3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja

I. Indikator Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja meningkat diukur dengan indikator Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan. Penghitungan dari indikator tersebut adalah Jumlah Pencari kerja yang dilatih dibagi Jumlah Pencari kerja yang di fasilitasi Kartu Pencari Kerja. Penetapan Target pada waktu penyusunan Perubahan Renstra pada tahun 2020 sangat rendah mengingat alokasi Anggaran Pelatihan sangat sedikit, sehingga hanya ditargetkan sebanyak 100 orang yang dilatih dibagi pencari kerja yang ditargetkan sebanyak 2000 pencari kerja sehingga diperoleh angka 5%. Namun seiring dengan perbaikan Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan alokasi anggaran yang cukup memadai sehingga Jumlah Pencari kerja yang dilatih meningkat menjadi 230 Orang.

Selain itu, dengan adanya penambahan Anggaran DBHCHT yang dipergunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, sehingga pada tahun 2022 terdapat penambahan Pencari Kerja terdaftar yang dilatih sebanyak 335 Orang. Sedangkan Realisasi Jumlah Pencari kerja yang di fasilitasi Kartu Pencari Kerja meningkat menjadi 2175 Orang. Dengan total Pencari kerja yang dilatih sebanyak

565 orang dan Jumlah Pencari kerja yang di fasilitasi Kartu Pencari Kerja 2175 Orang, diperoleh capaian sebesar 25,98%.

Capaian indikator Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	
			2021	2022
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	5 %	14,08%	25,98%

Kegiatan yang mendukung pencapaian Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja antara lain :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi :
Total Peserta Pelatihan 565 Orang
 - Melalui APBD sebanyak 230 Orang
 - Pelatihan Menjahit Busana Industri sebanyak 150 Orang dengan penempatan bekerja di PT. Sansan Saudaratex Jaya
 - Pelatihan Barista Coffee sebanyak 40 Orang
 - Pelatihan Bahasa Jepang bagi Masyarakat Pencari Kerja di Kota Cimahi, sebanyak 40 Orang
 - Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebanyak 335 Orang
 - Kegiatan pelatihan menjahit busana industri sebanyak 265 orang dengan penempatan bekerja di PT. Sansan Saudaratex Jaya
 - Kegiatan pelatihan bekam dan refleksi sebanyak 22 orang dengan penempatan berwirausaha atau bekerja mandiri
 - Kegiatan pelatihan menjahit busana industri sebanyak 20 orang dengan penempatan bekerja di PT. Trimas Sarana Industry
 - Kegiatan pelatihan IT Digital sebanyak 28 orang dengan penempatan bekerja di PT. For IT Asta Solusindo
2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang telah 27 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

II. Indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Memiliki Standar Kompetensi

Sedangkan indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi capaiannya sebesar 8,85%, walaupun belum memenuhi target sebesar 10% namun capaiannya terbilang tinggi dan juga telah meningkat dari tahun 2021 yang hanya sebesar 4,28%. Hal ini masih disebabkan karena masih tidak adanya alokasi anggaran yang khusus untuk kegiatan sertifikasi dengan standar nasional dikarenakan mahalnnya biaya pengiriman peserta sertifikasi. Sehingga Dinas Tenaga Kerja berinovasi dengan bekerja sama dengan APINDO untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang manajemen SDM/*Human Resources Departement*.

Penghitungan dari indikator tersebut adalah Jumlah Pencari kerja yang memiliki kompetensi dibagi Jumlah Pencari kerja yang dilatih. Penetapan Target pada waktu penyusunan Perubahan Renstra pada tahun 2020 sangat rendah mengingat alokasi Anggaran Pelatihan sangat sedikit, sehingga hanya ditargetkan sebanyak 10 orang yang dari keseluruhan pencari kerja yang dilatih yang di ikut sertakan dalam program sertifikasi kompetensi, dibagi pencari kerja yang dilatih yang ditargetkan sebanyak 100 orang sehingga diperoleh angka 10%. Namun seiring dengan perbaikan Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan alokasi anggaran yang cukup memadai dan diikuti dengan alokasi anggaran DBHCHT sehingga Jumlah Pencari kerja yang dilatih meningkat menjadi 565 Orang, sedangkan tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi sebanyak 50 Orang. Sehingga diperoleh persentase 8,85%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 4,28%.

Capaian indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	
			2021	2022
1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	10 %	4,28%	8,85%

Sertifikasi kompetensi Kompetensi yang dimaksud menggunakan skema Badan Nasional/Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN).

Dari kegiatan tersebut, menghasilkan 50 orang yang lulus dan memperoleh Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi kompetensi bagi para pelaku profesi HR dianggap penting untuk dimiliki, sertifikasi ini juga memberikan beberapa manfaat, di antaranya :

Bagi Industri

- Membantu Industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- Membantu Industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi (dampaknya meningkatkan efisensi HRD)
- Memastikan Perusahaan mendapatkan tenaga yang kompeten.
- Membantu Perusahaan dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi.

Bagi Tenaga Kerja

- Sebagai Bukti pengakuan Negara terhadap kompetensi Tenaga Kerja
- Membantu tenaga kerja meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.
- Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri Tenaga kerja.
- Membantu tenaga kerjadalam merencanakan karirnya.
- Membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- Membantu tenaga kerja dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara

Bila dilihat dari efesiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada
Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja**

No	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2022		%	Efisiensi
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	10 %	8,85%	88,50%	2.687.298.100	2.587.291.920	96,28%	-3,72%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	5%	25,98%	519,54				
Jumlah					348,27%	2.687.298.100	2.587.291.920	96,28%	-3,72%

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran Sasaran Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja adalah sebesar 348,27%, sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 98,28 % sehingga dapat diperoleh nilai efesiensi penggunaan sumberdaya pencapaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja adalah sebesar 249,99% (348,27% - 96,28 %).

3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja diukur dengan indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan capaiannya jauh melebihi target. Penghitungan dari indikator tersebut adalah Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari kerja yang difasilitasi Kartu Pencari Kerja. Penetapan Target pada waktu penyusunan Perubahan Renstra pada tahun 2020 sebesar 50% dengan asumsi masih banyaknya perusahaan yang belum beroperasi secara optimal sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja di Perusahaan. Namun demikian dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian Kota Cimahi yang didukung pula oleh bergulirnya program-program pemulihan ekonomi di Pusat, Provinsi dan di Kota Cimahi. Hampir seluruh lapangan usaha di kota Cimahi mengalami peningkatan di tahun 2022 yang menunjukkan adanya perbaikan aktivitas produksi di sektor tersebut. Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1037 Orang menjadi 1947 Orang, sedangkan Pencari Kerja yang di fasilitasi kartu pencari kerja meningkat dari sebelumnya 1335

Orang menjadi 2175 Orang. Sehingga diperoleh persentase 89,52%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 77,68%.

Capaian indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	
			2021	2022
1	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	50 %	77,68%	89,52%

Seiring dengan peningkatan Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan, hal ini sangat berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran. Setelah pada mengalami sedikit penurunan TPT pada tahun 2021, TPT di Kota Cimahi kembali menurun secara signifikan pada tahun 2022. Menurut data BPS TPT Kota Cimahi Tahun 2022 tercatat menurun sebesar -2,3 poin menjadi 10,77 %.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja antara lain :

1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota telah berhasil menempatkan sebanyak 1947 orang.
 - BKK : 564 Orang
 - LPK : 77 Orang
 - Sidakep Tri : 678 Orang
 - CPMI : 63 Orang
 - Pelatihan : 565 Orang
2. Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari kerja di Kota Cimahi telah dilakukan bimbingan teknis yang diikuti 100 orang siswa/siswi kelas XII SMK asal Kota Cimahi
3. Sosialisasi Pelayanan Disabilitas Pada Perusahaan yang diikuti Diikuti sebanyak 100 orang perwakilan dari perusahaan di kota cimahi
4. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan Bimbingan Teknis bagi Operator Aplikasi Sidakep Tri Mobile yang diikuti 85 orang peserta terdiri dari :
 - 1) Bursa kerja khusus (BKK) : 24 orang,
 - 2) Lembaga pelatihan kerja (LPK) : 27 orang
 - 3) Perusahaan : 34 orang

5. Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sosialisasi tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diikuti sebanyak 33 orang dari 24 perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kota Cimahi.

Bila dilihat dari efesiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Efesiensi Penggunaan Sumber Daya pada
Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja**

No	Sasaran Strategi	IndikatorKinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2022		%	Efisiensi
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	50%	89,52%	155,36%	607,625,400	538,625,400	88,73%	7,47
						13,805,000	13,296,900	96,32%	
Jumlah					155,36%	620,816,300	551,922,300	92,53%	60,83

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja adalah sebesar 155,36%, sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 92,53 % sehingga dapat diperoleh nilai efesiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja adalah sebesar 60,83% (155,36%-92,53 %).

3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial meningkat diukur dengan Indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan ditargetkan 50% dan realisasi 100% dengan tingkat capaian indikator 200%. Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah diselesaikan berjumlah 45 kasus, 24 Kasus diantaranya diselesaikan melalui Perjanjian Bersama, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 17 Kasus.

Capaian Indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	
			2021	2022
1	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	50 %	95,65 %	100%

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 3 antara lain :

1. Konsolidasi Peringatan Hari Buruh Internasional Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022 dengan Acara *Outbond*, Jumlah Peserta 115 Orang
2. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi:
 - 1) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
 - 2) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 92)
 - 3) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
 - 4) Serikat Pekerja Nasionall (SPN)
 - 5) Kongres Aliasni Serikat Pekerja Buruh Indonesia (KASBI)
 - 6) Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI)
3. Sosialisasi Struktur Skala Upah Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022 diikuti oleh 50 peserta dari unsur pengusaha, yang ada di wilayah Kota Cimahi
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional Jamsosnas (BPJS) Tahun 2022, yang diikuti hari pertama dan hari kedua oleh 100 peserta dari unsur pengusaha, unsur serikat dan unsur pemerintah yang ada di wilayah Kota Cimahi.

Selain itu dalam upaya pencapaian kondusifitas ketenagakerjaan, Disnaker juga berhasil meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Tenaga Kerja sebanyak 914 Perusahaan atau 58,18% dari total 1571 Perusahaan dengan Jumlah peserta BPJS bagi Tenaga Kerja sebanyak 62.471 orang atau 95.07%. Selain itu jumlah perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kota juga meningkat menjadi 224 perusahaan atau 14,26% yang artinya terjadi peningkatan sebesar 6,26% dengan jumlah Tenaga Kerja penerima UMK 33,682 orang, dengan penambahan sebanyak 10,876 orang. Begitu pula jumlah perusahaan yang mempekerjakan kaum Disabilitas kembali meningkat menjadi 143 orang dari semula 107 orang.

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan
Hubungan Industrial**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2022		%	Efisiensi
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	50%	100%	200%	1.211.257.200	1.176.996.990	97.17	2.83
Jumlah					200%	1.211.257.200	1.176.996.990	97.17	102.83

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran 3 adalah sebesar 200%, sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 97.17% sehingga dapat diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran 3 adalah sebesar 102.83% (200% - 97.17 %).

3.3. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Ringkasan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan
Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022**

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI	%	SURPLUS/ DEFISIT
PENDAPATAN	0	0	0	0
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	0
Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0
Hasil Retribusi Daerah/ IMTA	255.000.000	0	0	0
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya)*	0	0	0	0
DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bag iHasil Bukan Pajak	1.503.156.500	1.466.094.560	97,53%	37.061.940
Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	0
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	0

Dari tabel tersebut dapat dijabarkan bahwa realisasi pendapatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.0 (0%), Masihbelum mencapai target yang direncanakan sebesar 255.000.000. Target tersebut belum dapat dicapai dikarenakan adanya pengalihan pembayaran retribusi ke Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor : 011/5976/SJ pada point C, dikarenakan Pemerintah Kota Cimahi belum memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tenaga Asing pada bagian ketiga Pasal 23 angka 1 yang berbunyi “pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA (dana konfensasi penggunaan tenaga kerjaasing) atas setiap TKA yang di pekerjakan”

Dan untuk Dana Perimbangan dapat dijabarkan bahwa realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.503.156.500, dengan realisasi

sebesar Rp.1.466.094.560 yang bersumber dari Dana DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau), adapun dana dimaksud untuk kegiatan :

1. Kegiatan pelatihan menjahit busana industri sebanyak 265 orang dengan penempatan bekerja di PT. Sansan Saudaratex Jaya
2. Kegiatan pelatihan bekam dan refleksi sebanyak 22 orang dengan penempatan berwirausaha atau bekerja mandiri
3. Kegiatan pelatihan menjahit busana industri sebanyak 20 orang dengan penempatan bekerja di PT. Trimas Sarana Industry
4. Kegiatan pelatihan IT Digital sebanyak 28 orang dengan penempatan bekerja di PT. ForIT Asta Solusindo

**Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022**

PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PAGU ANGGARAN (TARGET)	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	SISA ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA (%)
	FISIK (%)	KEU (%)				
BELANJA DAERAH			10.949.849.853	10.295.214.368	654.635.485	
BELANJA OPERASI	100,00	94,02	10.931.658.853	10.277.964.368	653.694.485	94,02
Belanja Barang dan Jasa	100,00	93,91	5.887.036.600	5.528.781.606	358.254.994	93,91
Belanja Pegawai	100,00	94,14	5.044.622.253	4.749.182.762	295.439.491	94,14
BELANJA MODAL	100,00	94,83	18.191.000	17.250.000	941.000	94,83
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,00	94,83	18.191.000	17.250.000	941.000	94,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	92,91	6.330.471.575	5.881.800.458	448.671.117	92,91
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	89,56	126.173.300	112.995.760	13.177.540	89,56
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	75,22	22.853.800	17.190.800	5.663.000	75,22
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	89,63	6.043.700	5.416.800	626.900	89,63
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00	83,60	7.568.100	6.327.100	1.241.000	83,60
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	100,00	73,92	4.474.900	3.308.000	1.166.900	73,92
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100,00	93,40	3.404.000	3.179.500	224.500	93,40
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	94,80	81.828.800	77.573.560	4.255.240	94,80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	94,13	5.102.869.753	4.803.346.572	299.523.181	94,13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	94,14	5.044.622.253	4.749.182.762	295.439.491	94,14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	76,56	5.628.400	4.308.950	1.319.450	76,56
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00	94,75	52.619.100	49.854.860	2.764.240	94,75
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	38,50	23.210.000	8.937.000	14.273.000	38,50



Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	38,50	23.210.000	8.937.000	14.273.000	38,50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	95,27	70.199.700	66.876.000	3.323.700	95,27
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	95,27	70.199.700	66.876.000	3.323.700	95,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	96,70	299.836.822	289.929.850	9.906.972	96,70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	96,78	30.062.800	29.093.450	969.350	96,78
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	99,85	38.597.200	38.539.400	57.800	99,85
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	90,31	17.646.822	15.937.000	1.709.822	90,31
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00	71,67	24.000.000	17.200.000	6.800.000	71,67
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	95,83	6.000.000	5.750.000	250.000	95,83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	99,93	183.530.000	183.410.000	120.000	99,93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	85,14	282.905.000	240.875.000	42.030.000	85,14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	85,14	282.905.000	240.875.000	42.030.000	85,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	86,87	110.028.000	95.578.356	14.449.644	86,87
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	31,17	18.600.000	5.797.776	12.802.224	31,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	98,20	91.428.000	89.780.580	1.647.420	98,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	83,51	315.249.000	263.261.920	51.987.080	83,51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	81,73	223.104.000	182.334.870	40.769.130	81,73
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00	87,83	92.145.000	80.927.050	11.217.950	87,83
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100,00	97,20	100.006.678	97.202.700	2.803.978	97,20
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100,00	97,20	100.006.678	97.202.700	2.803.978	97,20
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100,00	97,20	100.006.678	97.202.700	2.803.978	97,20
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100,00	96,28	2.687.298.100	2.587.291.920	100.006.180	96,28
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100,00	96,48	2.621.646.300	2.529.345.520	92.300.780	96,48
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100,00	96,48	2.621.646.300	2.529.345.520	92.300.780	96,48
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100,00	88,26	65.651.800	57.946.400	7.705.400	88,26
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100,00	88,26	65.651.800	57.946.400	7.705.400	88,26
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	100,00	88,73	607.011.300	538.625.400	68.385.900	88,73
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	84,73	290.644.300	246.272.330	44.371.970	84,73
Pelayanan antar Kerja	100,00	84,86	209.584.200	177.861.430	31.722.770	84,86



Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100,00	81,45	43.983.400	35.823.850	8.159.550	81,45
Perluasan Kesempatan Kerja	100,00	87,89	37.076.700	32.587.050	4.489.650	87,89
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100,00	93,68	290.874.300	272.505.320	18.368.980	93,68
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	100,00	96,94	137.877.000	133.651.510	4.225.490	96,94
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	100,00	90,76	152.997.300	138.853.810	14.143.490	90,76
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	77,86	25.492.700	19.847.750	5.644.950	77,86
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	77,86	25.492.700	19.847.750	5.644.950	77,86
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100,00	97,17	1.211.257.200	1.176.996.990	34.260.210	97,17
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	96,20	436.558.000	419.962.860	16.595.140	96,20
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100,00	97,89	46.499.000	45.516.600	982.400	97,89
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	100,00	90,66	46.499.000	42.157.600	4.341.400	90,66
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	100,00	96,72	343.560.000	332.288.660	11.271.340	96,72
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	97,72	774.699.200	757.034.130	17.665.070	97,72
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	96,54	320.570.100	309.481.760	11.088.340	96,54
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	96,83	89.730.100	86.887.710	2.842.390	96,83
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	100,00	99,88	198.572.000	198.334.800	237.200	99,88
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100,00	97,89	165.827.000	162.329.860	3.497.140	97,89
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100,00	96,32	13.805.000	13.296.900	508.100	96,32
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	96,32	13.805.000	13.296.900	508.100	96,32
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	96,32	13.805.000	13.296.900	508.100	96,32
TOTAL / RATA - RATA	100,00	94,02	10.949.849.853	10.295.214.368	654.635.485	94,02

Secara keseluruhan anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah Rp.10.949.849.853 sedangkan realisasi belanja langsung Rp. 10.295.214.368



(94,02%). Adapun sisa realisasi dari anggaran belanja sebesar Rp. 654.635.485.

Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efesiensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, perlu disajikan belanja yang terealisasi dalam rangka mencapai kinerja tahun 2022. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun 2022		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	10%	8,85 %	88,50 %	2.687.298.100	2.587.291.920	96.28%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	5%	25,98%	519,54%			
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	50%	77,68%	155,36%	607.011.300	538.625.400	88.73%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	50%	100 %	200 %	1.211.257.200	1.176.996.990	97.17%
Jumlah						10.949.849.853	10.295.214.368	94,02%

Dari tabel tersebut dapat diketahui pencapaian realisasi keuangan untuk urusan Ketenagakerjaan yaitu:

1. Sasaran 1. Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja pagu anggaran sebesar Rp. 2.687.298.100 Realisasi 2.587.291.920 (96.28%) Sedangkan
2. Sasaran 2. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp. 607.011.300 terealisasi sebesar Rp.538.625.400 (88.73%)
3. Sasaran 3. Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp. 1.211.257.200 terealisasi sebesar Rp. 1.176.996.990 (97.17%)

3.4 Inovasi

SIDAKEPTRI MOBILE

Di era reformasi birokrasi dan industri 4.0 ini pelayanan publik dituntut untuk semakin berinovasi tak terbatas oleh ruang dan waktu. Salah satu inovasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi adalah Sistem



Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan terintegrasi (SIDAKEPTRI) yang merupakan sebuah aplikasi layanan penyedia informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan pengajuan Kartu Pencari Kerja (AK1) Online.



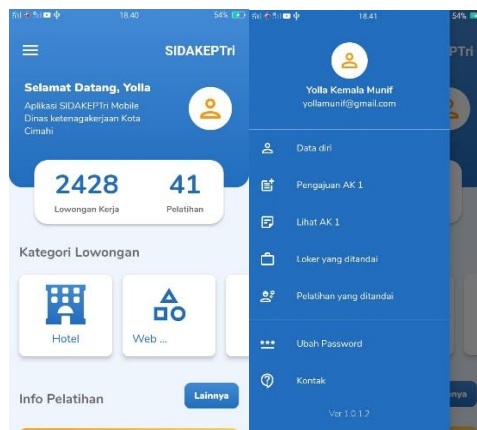
Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan terintegrasi (SIDAKEPTRi) Dinas Tenaga Kerja KotaCimahi merupakan sebuah Strategi penurunan tingkat pengangguran terbuka, berupa fitur atau aplikasi yang terhubung pada website resmi Dinas TenagaKerja Kota Cimahi <https://disnaker.cimahikota.go.id/> yang dapat diakses oleh masyarakat pencari kerja atau stake holder lain yang membutuhkan. Aplikasi SIDAKEPTRI akan mensinergikan antara Data Base ketenagakerjaan, system link & match dan informasi pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai Lembaga pelatihan kerja di Kota Cimahi dan di luar Kota Cimahi. Selain itu, jejaring ketenagakerjaan akan dibangun melalui aplikasi ini dengan system ketenagakerjaan provinsi Jawa Barat dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

- Melalui SIDAKEPTRI, para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan kesempatan bekerja, dan perusahaan akan mendapatkan kemudahan untuk merekrut tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, SIDAKEPTRI memberikan kemudahan untuk para pencari kerja dalam melakukan pengajuan Kartu Pencari Kerja (AK1) sehingga pencari kerja dapat melakukan pengajuan dan mencetak Kartu Pencari Kerja (AK1) dimana saja dan kapan saja. Penerapan layanan ketenagakerjaan berbasis teknologi informasi ini merupakan suatu langkah dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi dimana penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini masih bersifat manual bertransformasi ke arah digital dan terintegrasi kedalam satu system layanan berbasis teknologi informasi.

SIDAKEPTRI merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja kota Cimahi kepada masyarakat untuk mendukung Visi Kota Cimahi tahun yaitu Mewujudkan **CIMAH KOTA CERDAS**.

SIDAKEPTRI menghadirkan berbagai Layanan Ketenagakerjaan secara digital yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Cimahi serta dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store dengan cara yang sangat mudah, cepat dan praktis untuk digunakan.

Masyarakat di Kota Cimahi yang sudah mengunduh aplikasi SIDAKEPTRI dapat dengan mudah, cepat, kapan saja dan dimana saja untuk membuat AK-1, Mencari Lowongan Pekerjaan ataupun meningkatkan kompetensi melalui Pelatihan Kerja yang di selenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sesuai dengan kebutuhan, hanya dengan beberapa langkah saja.



Langkah pertama :

- Unduh Aplikasi SIDAKEPTRI MOBILE pada Google Play Store sampai sukses
- Buka aplikasi SIDAKEPTRI MOBILE pada handphone masing-masing selanjutnya melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan akan mendapat konfirmasi lewat email yang di daftarkan
- Selanjutnya klik tombol Login untuk bisa memilih menu yang ada di dalam SIDAKEPTRI MOBILE

Silahkan pilih menu sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Cimahi Melalui SIDAKEPTRI, para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan kerja, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan kesempatan bekerja, dan perusahaan akan mendapatkan kemudahan untuk merekrut tenaga kerja yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Penerapan layanan ketenagakerjaan berbasis

teknologi informasi ini merupakan suatu langkah dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi dimana penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini masih bersifat manual bertransformasi kearah digital dan terintegrasi kedalam satu system layanan berbasis teknologi informasi.

Platform aplikasi pencari kerja mayoritas dikembangkan oleh kalangan swasta, dan baru beberapa saja platform aplikasi pencari kerja yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten. SIDAKEPTRI merupakan terobosan inovatif dari Disnaker Kota Cimahi

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2022. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2022 dapat disimpulkan:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi	10%	8,85 %	88,50 %
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	5%	25,98%	519,54%
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	50%	77,68%	155,36%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Buruh dan Keharmonisan Hubungan Industrial	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	50%	100 %	200 %

1. Tiga dari empat indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, yaitu:
- Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan,
 - Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan dan
 - Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan

Ketiga indikator tersebut capaiannya telah melampaui target. Adapun indikator sasaran Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi capaiannya belum melampaui target, namun telah masuk ke kategori tinggi. Hal ini disebabkan masih tidak adanya alokasi anggaran yang khusus untuk kegiatan sertifikasi dengan standar nasional dikarenakan mahalnya biaya pengiriman peserta sertifikasi. Namun demikian Dinas Tenaga Kerja telah berinovasi dengan bekerja sama dengan APINDO untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang manajemen SDM/*Human Resources Departement*.

2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan meningkat dengan tingkat capaian 519,54%;
 - b. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi meningkat dengan tingkat capaian 88,50%;
 - c. Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan meningkat dengan tingkat capaian 155,36 %;
 - d. Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan meningkat dengan tingkat capaian 200%;
3. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan meliputi :
 - a. Adanya Alokasi Anggaran dari APBD Murni;
 - b. Optimalisasi koordinasi intensif dan jejaring kerja secara vertikal dan horizontal;
 - c. Adanya Anggaran DBHCHT yang dipergunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, sehingga pada tahun 2022 terdapat penambahan Pencari Kerja terdaftar yang dilatih sebanyak 335 Orang;
 - d. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada aplikasi Sidakeptri dan media dalam publikasi informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan pelayanan pembuatan AK. 1 secara online.
 4. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang memiliki standar Kompetensi berinovasi dengan bekerja sama dengan APINDO untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang manajemen SDM/*Human Resources Departement*. Sertifikasi kompetensi Kompetensi yang dimaksud menggunakan skema Badan Nasional/Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN). Dari kegiatan tersebut, menghasilkan 50 orang yang lulus dan memperoleh Sertifikasi Profesi (BNSP).
 5. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
 - a. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada aplikasi Sidakeptri dan media dalam publikasi informasi lowongan pekerjaan, informasi pelatihan dan pelayanan pembuatan AK. 1 secara online;
 - b. Optimalisasi koordinasi intensif dan jejaring kerja secara vertikal dan horizontal;

- c. Adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yang bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki MOU dengan Industri;
 - d. Pembinaan terhadap BKK secara rutin oleh Dinas Tenaga Kerja
6. Faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan
- a. Kehadiran para pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial
 - b. Itikad baik dari para pihak dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - c. Satu pemikiran untuk menemukan suatu solusi yang mengarah ke win win solution.
7. Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp. 654.635.485 atau 5,98%. Meskipun kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun 2022 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:
- a. Melaksanakan review Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi secara berkala;
 - b. Menyusun rencana aksi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pada awal tahun; dan
 - c. Optimalisasi potensi, sumber daya dan jejaring kerja Dinas Tenaga Kerja;
 - d. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.